

ANALISIS KINERJA KEUANGAN APBDes SAAT PANDEMI

Birgita Neysa Naomi Efrem Mentari¹

Imelda Sinaga^{2*}

Victoria Ari Palma Akadiati³

^{1,2,3}(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gontiasari)

1neysanaomi07@gmail.com, 2*proficiatmelsi@gmail.com, 3vicaripalma23@gmail.com

Abstract

APBDes is the village government's yearly financial plan, which cover revenue, expenditures, and finance to support village development initiatives. The purpose of this study was to determine the financial performance of the APBDes in Gumuk Rejo Village in terms of efficiency, effectiveness, and independence during the pandemic. This research method is a quantitative research technique with a descriptive approach was employed with a population of 2,064 participants. The sampling approach employs the Isaac & Michael formula, with a total sample size of 323 participants. The data was gathered via a questionnaire, which was sent to respondents via social media. The index analysis approach was employed in the data analysis technique. According to the findings of this study, the Gumuk Rejo APBDes' financial performance is efficient, quite effective, and has high independence. Efficient occurs because the village government can provide easy access to village financial reports for users and there is a high level of community participation in village deliberations, it is quite effective because the distribution of information acquisition regarding the implementation of village fund programs funded from the APBDes used is still low, and it is highly independent because the village fund budget used is right on target distribution.

Keywords: APBDes, Efficiency, Effectiveness, Dependency

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan pandemi global yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak dari wabah Covid-19 juga berdampak pada kinerja keuangan yang terlihat dari turunnya berbagai aktivitas ekonomi (liputan6.com, 2020). Berbagai kebijakan telah dibuat untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 hingga ke tingkat desa. Penyaluran dana desa saat pandemi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai jauh lebih efektif (merdeka.com, 2021). Hal ini terlihat pada perubahan penyaluran dana desa sebelum pandemi yang dilakukan secara bertahap mulai dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diakhiri ke Rekening Kas Desa (RKD). Saat pandemi dilakukan transfer secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) (Kumparan.com, 2021). Penyaluran BLT ini difokuskan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 serta warga kurang mampu yang berimbas terhadap wabah ini. Maka, diperlukannya perubahan peraturan yang mengatur mengenai penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021) guna meningkatkan bantuan dalam penanganan wabah Covid-19. Dana desa dibagikan secara bertahap, mulai dari APBN, kemudian APBD, dan terakhir APBDes.

Program alokasi dana desa diharapkan dapat mengubah potensi desa yang beragam dengan memiliki kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap pemerintah daerah dihimbau untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan menggunakan dana desa yang diterima dari APBDes. APBDes bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan akses sumber daya ekonomi. Pemerintah desa harus mencermati setiap program yang direncanakan dalam mengelola keuangan desa. Kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai jika implementasinya tidak tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa disalurkan dengan efisiensi dan efektivitas demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian Lewis (2015) menunjukkan adanya kelemahan rancangan dana desa yang mengarah pada tindakan korupsi termasuk penugasan layanan yang tidak jelas, anggaran berkembang pesat dan relatif besar, prosedur

pengelolaan keuangan publik yang tidak memadai, serta sistem kontrol dan akuntabilitas yang meragukan. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), beberapa kejadian korupsi di sektor anggaran desa terjadi pada 2019 (Ramadhan, 2020). Menurut statistik ICW, ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari total 271 kasus. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 32,3 M. Tingginya tingkat korupsi dalam keuangan desa menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki sistem yang kuat dalam pengawasan pendapatan daerah. Kasus lain juga terjadi pada seorang mantan kepala desa yang diduga telah terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan APBDes senilai Rp174.638.235 (Prasetya, 2021). Tindakan kasus korupsi tersebut terungkap tahun 2017 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. (Irfan, 2017) mengungkapkan bahwa alasan terjadinya tindakan kasus korupsi dalam penggunaan dana desa karena kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, keterbatasan kompetensi kepala desa dan perangkat desa, kelembagaan desa yang kurang optimal, serta politisasi penggunaan dana sebagai bagian dari pemilihan kepala desa merupakan salah satu faktor tersebut.

Desa Gumuk Rejo terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan BPS Kabupaten Pringsewu (2021), Kab. Pringsewu memiliki 131 desa/kelurahan selama tahun 2019. Meminimalisir dampak ketertinggalan dan rendahnya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mengoptimalkan pengelolaan dana desa melalui APBDes. Angka kemiskinan kab. Pringsewu selama 3 tahun yaitu tahun 2018 (10,50%), 2019 (10,15%), dan 2020 (9,97%) berdasarkan data BPS Kabupaten Pringsewu (2021) yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan selama tiga tahun tersebut. Upaya pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan melakukan kebijakan alokasi dana desa. Melalui kebijakan ADD, pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya dana pemerintah yang dialokasikan ke desa digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa.

Berdasarkan uraian fenomena dan gap di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efisiensi, efektifitas dan kemandirian realisasi APBDes saat pandemi di desa Gumuk Rejo, Pagelaran.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI No 20/2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang digunakan untuk mendukung program kebutuhan pembangunan desa. Desa memiliki banyak sumber pendapatan menurut temuan (Watts *et al.*, 2019). Pertama, dana desa dapat dihasilkan melalui unit usaha yang digunakan untuk mengelola aset desa dan penyediaan layanan publik. Kedua, menerima dana desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Ketiga, menerima bagian dari pendapatan pemerintah kabupaten melalui retribusi atau pajak dengan minimal 10% dari total penerimaan pajak. Keempat, desa menerima transfer dari alokasi dana desa sebesar 10% dari total transfer nasional ke pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kelima, desa dapat menerima dana alokasi khusus dari pemerintah kabupaten/provinsi, tetapi pemerintah daerah harus menentukan apakah dana tersebut akan dicairkan atau tidak sebagai bagian dari proses penganggaran setiap tahunan. Selain itu juga, menerima hibah dari pihak eksternal dan sumber pendapatan lain yang sah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa diselenggarakan dua kali setahun untuk desa dan satu kali setahun untuk kabupaten/kota. Pemerintah desa wajib melapor ke kabupaten/kota, dan kabupaten/kota wajib melapor ke Kementerian Keuangan

2.2 Efisiensi

Menurut temuan Low *et al.* (2000) efisiensi digunakan untuk mengukur hubungan antara input dan output dengan mengetahui seberapa besar pengaruh input diubah menjadi output. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output atau antara hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan (Krizanova *et al.*, 2019). Efisiensi tidak dapat dinilai secara langsung, melainkan indeks dan indikator kinerja terkadang digunakan untuk menilai efisiensi (Mandl *et al.*, 2008). Semakin sedikit input yang digunakan untuk menghasilkan output, semakin besar efisiensi (Low *et al.*, 2000). Proses kegiatan operasional dalam APBDes dianggap efisien apabila penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Yunianti, 2015). Menurut Umami dan Widodo (2021), pengelolaan anggaran yang efektif didukung oleh

pemerintah desa yang telah mencapai aspirasi masyarakat dengan memasukkan setiap pengeluaran dalam APBDes, sehingga uang tidak terbuang percuma dan dapat digunakan tepat sasaran. dan sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Efektivitas

Ravianto (2014) mendefinisikan efektivitas sebagai seberapa baik suatu tugas dapat dilaksanakan dan seberapa jauh individu tersebut dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diukur dengan efektivitasnya. Menurut Mandl *et al.* (2008), efektivitas mengacu pada hubungan antara input atau output dan tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu hasil. Jika proses kegiatan operasional mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir maka kegiatan tersebut dianggap efektif. Semakin tinggi kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi tersebut (Mahmudi, 2005). Penelitian Lestari dkk. (2020), membuktikan bahwa pencapaian tingkat efektivitas didukung dengan adanya program-program desa, sedangkan program yang tidak terlaksana menimbulkan tidak efektif karena adanya kegiatan yang tidak berjalan dan ketidakefisiensi anggaran desa.

2.4 Kemandirian

Pentingnya peningkatan kemandirian fiskal desa yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah masyarakat bergantung pada pendanaan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa didorong untuk meningkatkan pendapatan desa dengan menggali potensi dan kegiatan yang tersedia sehingga mampu mengenali dan memanfaatkan potensi desa (Susanto dkk., 2021). Pengembangan potensi tersebut dapat membantu masyarakat untuk tumbuh dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kemandiriannya. Menurut penelitian Maulana (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian desa antara lain kedudukan dan kewenangan desa yang masih terbatas, kapasitas pemerintahan desa yang dipandang belum mampu menjalankan urusannya secara optimal, dan masalah organisasi desa, sumber daya manusia, dan pendanaan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengeksplorasi situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam pada kinerja

keuangan APBDes. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kinerja keuangan APBDes saat pandemi. Analisis tersebut memiliki tujuan yang diharapkan dapat dicapai yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana persepsi masyarakat terkait kinerja keuangan APBDes di desa Gumuk rejo berdasarkan tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian desa. Objek penelitian ini yaitu masyarakat yang tinggal di desa Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup, dimana pertanyaan tertulis yang telah disediakan pilihan jawaban bagi responden. Pertanyaan kuesioner disusun sesuai indikator penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari masyarakat desa sebagai responden penelitian. Penyebaran kuesioner menggunakan *google form* yang penyebarannya dilakukan kepada responden melalui sosial media.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarat desa Gumuk Rejo yang berusia > 17 tahun dengan jumlah penduduk 2.064 orang. Populasi penelitian ini terlalu besar dan wilayah desa yang luas maka pengambilan data sampel menggunakan rumus tertentu untuk mengurangi jumlah sampel atau mempersempit wilayah populasi sehingga dapat memberikan representasi pada objek yang akan diteliti. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Issac & Michael dengan taraf kesalahan 5%. Rumus dapat dilihat yaitu:

$$S = \frac{\lambda^2 NP(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 P(1-P)}$$

- S = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- P = Proporsi dalam populasi (P = 0,50)
- d = Ketelitian / derajat ketetapan (0,05)
- λ^2 = Nilai tabel chi kuadrat ($\lambda^2 = 3,841$ taraf signifikansi 95 %)

Hasil rumus di atas maka dapat ditentukan jumlah sampel yang diperoleh yaitu 323 sampel.

Skala Guttman digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini, dan bentuk skala ukur ini menghasilkan jawaban “Ya/Tidak”. Setiap kriteria disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberi skor berdasarkan kondisi sebenarnya yang ada di desa, berdasarkan tingkatan jawaban. Kriteria jawaban terdiri dari pertanyaan positif dan negatif. Pertanyaan positif akan mendapatkan skor 1 untuk jawaban “Ya”, sedangkan skor 0 untuk jawaban “Tidak”. Persentase dihitung dengan jumlah jawaban setiap item, maka indeks jawaban responden dihitung menggunakan rumus (Champion, 1981):

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban Ya}}{\sum \text{Pertanyaan kuesioner}} \times 100\%$$

Penilaian hasil indeks menurut (Champion, 1981) diklasifikasikan sebagai berikut:

“The following crude guide may be used to assess the general strength of association coefficients”:

0,00 – 0,25 = *“(no association or low association (weak association))”*

0,26 – 0,50 = *“(moderately low association (moderately weak association))”*

0,51 – 0,75 = *“(moderately high association (moderately strong association))”*

0,76 – 1,00 = *“(high association (strong association) up to perfect association)”*

Pernyataan penilaian persentase di atas dapat diartikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Kriteria persepsi masyarakat desa terhadap efisiensi kinerja keuangan

Kriteria	Rentang skor
Kinerja Keuangan Efisien	76% - 100%
Kinerja Keuangan Cukup Efisien	51% - 75%
Kinerja Keuangan Kurang Efisien	26% - 50%
Kinerja Keuangan Tidak Efisien	0% - 25%

Pernyataan penilaian persentase di atas dapat diartikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Kriteria persepsi masyarakat desa terhadap efektivitas kinerja keuangan

Kriteria	Rentang skor
Kinerja Keuangan Efektif	76% - 100%
Kinerja Keuangan Cukup Efektif	51% - 75%
Kinerja Keuangan Kurang Efektif	26% - 50%
Kinerja Keuangan Tidak Efektif	0% - 25%

Pernyataan penilaian persentase di atas dapat diartikan pada Tabel 3

Tabel 3. Kriteria persepsi masyarakat desa terhadap kemandirian kinerja keuangan

Kriteria	Rentang skor
Kemandirian Kinerja Keuangan Tinggi	76% - 100%
Kemandirian Kinerja Keuangan Sedang	51% - 75%

Kemandirian Kinerja Keuangan Rendah	26% - 50%
Kemandirian Kinerja Keuangan Rendah Sekali	0% - 25%

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penyebaran kuesioner penelitian

Hasil pengumpulan data kuesioner disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah (N)
Keusioner yang dibagikan	323
Kuesioner yang tidak Kembali	(291)
Kuesioner yang layak dijadikan keperluan input data	32

Sumber: Hasil data yang telah diolah, 2021

Jumlah kuesioner yang dibagikan per orang berjumlah 1 kuesioner. Total kuesioner yang telah dibagikan ke masyarakat desa yaitu 323 kuesioner. Jumlah kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan sebanyak 32 kuesioner dan tidak dikembalikan sebanyak 291 kuesioner. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengumpulan data kuesioner tidak didistribusikan secara langsung kepada responden melainkan penyebaran data dibagikan menggunakan sosial media. Pengumpulan data tersebut diambil oleh peneliti dikarenakan wilayah penelitian terlalu luas dan sulitnya jangkauan responden seluruhnya secara langsung. Distribusi data diharapkan dapat memberikan jawaban yang terbaik sekaligus mengembalikan kuesioner yang telah diisi kepada peneliti. Namun, dalam beberapa situasi, kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti secara keseluruhan.

2) Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner disajikan pada Tabel 5:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden

Keterangan	Kategori	n	%
Jenis Kelamin	Perempuan	18	56,3%
	Laki-laki	14	43,8%
	Total	32	100%

Usia	19-27	22	68,8%
	28-36	6	18,8%
	37-45	2	6,2%
	46-53	2	6,2%
	Total	32	100%
Pendidikan terakhir	Tidak bersekolah	1	3,1%
	SMP	2	6,3%
	SMA/SMK	20	62,5%
	S1	9	28,1%
	Total	32	100%
Jabatan/Pekerjaan	Pelajar	8	25,1%
	Mahasiswa	4	12,5%
	Wiraswasta	3	9,4%
	Ibu Rumah Tangga	5	15,6%
	Pegawai Negeri	5	15,6%
	Pegawai Swasta	1	3,1%
	Buruh	2	6,3%
	Honorer	1	3,1%
	Karyawan	1	3,1%
	Pengangguran	1	3,1%
	Bekerja	1	3,1%
	Total	32	100%

Sumber : Data Primer Kuesioner, 2021

- 3) Penilaian Tingkat Efisiensi, Efektivitas, dan Kemandirian Kinerja Keuangan
a. Indikator Efisiensi Kinerja Keuangan

Hasil data respon pada penilaian tingkat efisiensi disajikan pada Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Data Respon Indikator Efisiensi

Responden	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Total
1	8	2	10
2	9	1	10
3	10	0	10
4	9	1	10
5	9	1	10
6	7	3	10
7	9	1	10
8	5	5	10
9	10	0	10
10	9	1	10
11	10	0	10

12	10	0	10
13	9	1	10
14	8	2	10
15	8	2	10
16	9	1	10
17	10	0	10
18	10	0	10
19	10	0	10
20	8	2	10
21	10	0	10
22	10	0	10
23	9	1	10
24	10	0	10
25	10	0	10
26	8	2	10
27	10	0	10
28	9	1	10
29	8	2	10
30	10	0	10
31	10	0	10
32	10	0	10
Total	291	29	320

Sumber: Hasil data yang telah diolah, 2021

Pada tabel di atas, persentase jawaban yang telah diberikan oleh responden pada indikator efisiensi kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban Ya}}{\sum \text{Pertanyaan kuesioner}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{291}{320} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 90,94$$

Persentase yang diperoleh pada indikator efisiensi kinerja keuangan dari perhitungan kuesioner yaitu 90,94%. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Dusun Gumuk Rejo di Pagelaran yang memiliki tingkat pengelolaan kinerja keuangan APBDes yang efisien.

b. Indikator Efektivitas Kinerja Keuangan

Hasil data respon pada penilaian tingkat efektivitas disajikan pada Tabel 7:

Tabel 7. Hasil Data Respon Indikator Efektivitas

Responden	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Total
1	0	10	10
2	5	5	10
3	10	0	10
4	5	5	10

5	4	6	10
6	3	7	10
7	3	7	10
8	6	4	10
9	9	1	10
10	7	3	10
11	9	1	10
12	6	4	10
13	9	1	10
14	9	1	10
15	0	10	10
16	6	4	10
17	8	2	10
18	9	1	10
19	5	5	10
20	4	6	10
21	3	7	10
22	7	3	10
23	5	5	10
24	9	1	10
25	10	0	10
26	5	5	10
27	10	0	10
28	4	6	10
29	4	6	10
30	5	5	10
31	9	1	10
32	4	6	10
Total	192	128	320

Sumber: Hasil data yang telah diolah, 2021

Pada tabel di atas, persentase jawaban yang telah diberikan oleh responden pada indikator efektivitas kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban Ya}}{\sum \text{Pertanyaan kuesioner}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{192}{320} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 60\%$$

Persentase yang diperoleh pada indikator efektivitas kinerja keuangan dari perhitungan kuesioener yaitu 60%. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Dusun Gumuk Rejo di Pagelaran yang memiliki tingkat pengelolaan kinerja keuangan APBDes yang cukup efektif.

c. Indikator Kemandirian Kinerja Keuangan

Hasil data respon pada penilaian tingkat kemandirian disajikan pada Tabel 8:

Tabel 8. Hasil Data Respon Indikator Kemandirian

Responden	Jawaban “Ya”	Jawaban “Tidak”	Total
1	4	6	10
2	8	2	10
3	10	0	10
4	9	1	10
5	8	2	10
6	6	4	10
7	8	2	10
8	5	5	10
9	10	0	10
10	10	0	10
11	9	1	10
12	10	0	10
13	10	0	10
14	5	5	10
15	0	10	10
16	10	0	10
17	10	0	10
18	10	0	10
19	8	2	10
20	9	1	10
21	10	0	10
22	6	4	10
23	9	1	10
24	10	0	10
25	10	0	10
26	9	1	10
27	9	1	10
28	4	6	10
29	9	1	10
30	10	0	10
31	10	0	10
32	10	0	10
Total	265	55	320

Sumber: Hasil data yang telah diolah, 2021

Pada tabel di atas, persentase jawaban yang telah diberikan oleh responden pada indikator kemandirian kinerja keuangan yaitu:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban Ya}}{\sum \text{Pertanyaan kuesioner}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{265}{320} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 82,81\%$$

Persentase yang diperoleh pada indikator efisiensi kinerja keuangan dari perhitungan kuesioener yaitu 82,81%. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Dusun Gumuk Rejo di Pagelaran yang memiliki tingkat pengelolaan kinerja keuangan APBDes yang tinggi.

Hasil capaian skor pada tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Capaian Skor Pada Indikator

No	Indikator	Capaian Skor	Hasil
1	Efisiensi	90,94% (Efisien)	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat tinggi mampu membantu pemerintah desa dalam peningkatan efisiensi pengelolaan APBDes - Keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam musyawarah desa tentang penggunaan APBDes - Potensi ekonomi yang besar dan kualitas SDM baik
2	Efektivitas	60% (Cukup Efektif)	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan anggaran dana desa kurang berkembang - Sistem informasi kurang memadai (tidak diperbaharui) - Pemerolehan informasi APBDes masih menggunakan banner - Pengendalian dan pemantauan pengelolaan anggaran desa masih terbatas
3	Kemandirian	82,81% (Kemandirian Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan desa, dan lapangan olahraga)

Sumber : Hasil olahan data (2021)

Nilai persentase jawaban responden yang telah diuji dalam tabel acuan tingkat efisiensi diatas sebesar 90,94% dapat disimpulkan desa Gumuk Rejo memiliki tingkat kinerja keuangan APBDes yang efisien. Pemerintah desa telah mampu memberikan akses cepat ke informasi keuangan desa kepada pengguna, yang akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan mengadakan musyawarah desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi mampu membantu pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan APBDes. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Umami dan Widodo (2021),

pengelolaan anggaran secara efisien didukung dengan adanya pemerintah desa yang telah mewujudkan keinginan masyarakat dimana setiap pengeluaran telah terdapat didalam APBDes, maka penggunaan dana tersebut tidak terbuang sia-sia sehingga mampu dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan APBDes sangat penting untuk menentukan apakah dana dibelanjakan dengan benar, dan komponen yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Belanja yang dilakukan pemerintah desa berdampak pada ekonomi daerah. Penelitian Basri dan Gusnardi (2021) menyatakan semua relokasi anggaran masuk ke pengeluaran tak terduga yang digunakan apabila keadaan mendesak seperti pandemic covid-19. Selama pandemi, APBDes diubah untuk memenuhi tanggap covid-19 di desa. Perubahan pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pendapatan asli daerah akan tinggi di daerah yang perekonomiannya kuat. Semakin baik situasi ekonomi suatu daerah, semakin besar kemungkinan untuk melihat pertumbuhan pendapatan asli daerah, menyiratkan bahwa efisiensi keuangan daerah tinggi.

Nilai persentase jawaban responden yang telah diuji dalam tabel acuan tingkat efisiensi diatas sebesar 60% dapat disimpulkan desa Gumuk Rejo memiliki tingkat kinerja keuangan APBDes yang cukup efektif. Kecenderungan tidak efektif kinerja keuangan adalah pemerataan perolehan informasi mengenai pelaksanaan program dana desa yang didanai dari APBDes yang digunakan masih rendah. Hasil ini terjadi karena sistem informasi mengenai data APBDes yang dapat diakses melalui situs web tidak diperbaharui secara berkala. Adanya sistem informasi yang dapat diakses melalui situs web diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terbaru mengenai pengelolaan dana desa yang digunakan. Data realisasi APBDes Gumuk Rejo yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan dicetak dalam bentuk *banner* yang digunakan untuk memberikan kemudahan informasi pengelolaan anggaran dana desa kepada masyarakat. APBDes dapat berjalan secara efektif jika didukung dengan adanya SDM yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur yang memadai. Desa memiliki efektivitas dengan cara tersendiri untuk melibatkan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan dana desa. Pelibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akan lebih diperhatikan. Adanya harapan kepada kelembagaan pemerintah desa dalam pendampingan tata Kelola keuangan desa agar pengelolaan dana pekon dapat dikelola dengan

baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelembagaan pemerintah desa meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan permusyawaratan desa. BPD yang dimaksud ketua rukun warga, tokoh adat, kelompok profesi, atau tokoh masyarakat lain. Kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menampung dan mencapai tujuan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Pandemic covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas keuangan Desa Gumuk Rejo, sistem pengelolaan keuangan publik desa yang masih kurang siap untuk memantau dan menangani pengeluaran dana desa mengakibatkan pencapaian tujuan pemerintah desa terhambat. Kesulitan terkait penugasan layanan khususnya dalam pengelolaan, pemantauan dan pengendalian keuangan membutuhkan lebih banyak waktu dalam perbaikannya, beberapa tindakan perbaikan yang dapat diambil dengan pelaksanaan audit anggaran desa eksternal maupun internal. Kebijakan tersebut dibuat untuk meninjau kembali terkait pendapatan, pembiayaan serta pengeluaran. Bagi pengelola dana desa dan staf yang bertanggung jawab secara konsisten mematuhi peraturan daerah pusat dalam menyusun rencana pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga membutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi akuntansi keuangan. Nilai moral dan etika juga diperlukan bagi pengelola dan staf dana desa yang bertanggung jawab untuk secara konsisten mematuhi peraturan daerah pusat dalam menyusun rencana pengelolaan APBDes.

Nilai persentase jawaban responden yang telah diuji dalam tabel acuan tingkat kemandirian diatas sebesar 82,81% dapat disimpulkan desa Gumuk Rejo memiliki tingkat kemandirian keuangan APBDes yang tinggi. Temuan ini menghasilkan bahwa anggaran dana desa yang digunakan tepat sasaran penyalurannya. Penggunaan APBDes digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan desa, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Penggunaan dana desa berpengaruh besar terhadap perencanaan desa sehingga dapat membangun kemandirian desa. Adanya peningkatan pendapatan anggaran desa dapat memberikan kemandirian desa sehingga mampu mengembangkan potensi dan ekonomi lokalnya. Unsur-unsur penghambat di masa pandemi yang menyulitkan dalam pengoperasian dana desa berdampak pada distribusi dan penyerapan anggaran. Konsekuensi keadaan ini mengakibatkan pembangunan desa terhambat tidak hanya dalam pelaksanaan

APBDes sebagai sumber pendapatan desa yang dioptimalkan untuk penanganan covid-19, tetapi juga penyalurannya. Sumber pendapatan transfer desa digunakan sebagai agenda kegiatan pembangunan desa. Akibat wabah pandemi, Kemendes mengarahkan agar seluruh desa melakukan *refocussing* dan merealokasi keuangan desa yang sebelumnya digunakan untuk menanggulangi Covid 19. Pembangunan desa tercapai ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Penelitian Yusuf *et. al* (2019) menyatakan dalam suatu perencanaan pembangunan umumnya harus ada analisis dan identifikasi yang bertujuan untuk menguraikan program yang akan direncanakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa. Pembentukan BUMDes diperlukan untuk mendukung masyarakat otonom dan menciptakan pendapatan desa yang lebih tinggi. Pengembangan BUMDesa mampu menciptakan semangat kemandirian dan kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan asset, memberikan pelayanan, dan meningkatkan perekonomian desa. *Township and Village Enterprises* memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi desa. Penelitian Fu dan Balasubramanyam (2003) menyatakan TVE dimiliki oleh penduduk lokal, tetapi dikendalikan, dikelola dan didukung oleh pemerintah daerah dalam merespons kekuatan pasar. Pemanfaatan BUMDes oleh masyarakat masih minim, baik di desa maupun di kecamatan. Jelas bahwa hanya sedikit orang yang telah mempekerjakan BUMDes di lingkungan. Penelitian Arifin *et. al* (2020) menyatakan, pemanfaatan dari BUMDes untuk pembiayaan, perdagangan/distribusi dan pengelolaan fasilitas umum. Pesatnya pertumbuhan BUMDes, serta terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan BUMDes, menjadi tantangan bagi pemerintah desa karena dapat memicu pemanfaatan BUMDes secara optimal. Tingkat keberhasilan BUMDes mempengaruhi pendapatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat setempat demi kesejahteraan desa.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan, dilihat pada Tabel 2.3 menunjukkan keadaan umum kinerja keuangan Gumuk Rejo berada pada tingkat efisiensi yang efisien artinya pemerintah desa mampu memberikan pengguna akses cepat ke informasi keuangan desa dan keterlibatan masyarakat, yang dapat membantu pemerintah desa meningkatkan efisiensi pengelolaan APBDes selama pandemi. Tingkat efektivitas kinerja keuangan berada pada tingkat efektivitas yang cukup efektif. Cukup efektif ini membuktikan sistem

informasi APBDes tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyulitkan pengguna untuk memperoleh informasi terkini tentang pengelolaan dana desa dan penyebaran informasi tentang APBDes masih menggunakan banner. Tingkat kemandirian finansial di dusun Gumuk Rejo menunjukkan alokasi anggaran dana desa sudah tepat sasaran seperti meningkatkan infrastruktur desa, mengurangi kemiskinan dan desa, serta pelayanan kepada masyarakat pedesaan dalam rangka menciptakan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan (pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan desa, dan lapangan olahraga).

Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian di satu desa yaitu Desa Gumuk Rejo, Pagelaran. Berdasarkan keterbatasan penelitian maka terdapat beberapa saran yang diharapkan :

a. Bagi Desa

Pengembangan sistem keuangan desa yang memiliki pembaruan data secara berkala sehingga masyarakat desa mampu melihat keterbaruan penggunaan APBDes serta perlunya peningkatan pembangunan BUMDes untuk aktif dalam meningkatkan usaha dan pendapatan desa.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Agar dapat melakukan penelitian tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian di dua atau lebih desa sehingga dapat dibandingkan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R.H., Wardhana, I.W., Setiawan, H., Damayanty, S.A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A.H., Ariutama, G.A., Djuned, P., Rahman, A.B., Handoko, R., 2020. Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies* 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Basri, Y. M. and Gusnardi. 2021. Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau), *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), pp. 33–48.
- BPS Kabupaten Pringsewu. 2021a. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu 2019. Available at: <https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/101/226/1/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pringsewu.html>.
- BPS Kabupaten Pringsewu. 2021b. Tabel Dinamis. Available at: <https://pringsewukab.bps.go.id/site/resultTab>.
- Champion, D. J. 1981. *Basic Statistics for Social Research*. Macmillan.
- Fu, X. and Balasubramanyam, V. N. 2003. Township and Village Enterprises in China, *The Journal of Development Studies*, 39(4), pp. 27–46. doi: 10.1080/713869424.
- Irfan, M. 2017. *Korupsi Dana Desa Kebanyakan Didalangi Kepala Desa*, *Pikiranrakyat.com*. Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01284442/korupsi-dana-desa-kebanyakan->

- didalangi-kepala-desa-407195 (Accessed: 8 October 2021).
- Krizanova, A., George, L., Gajanova, L., Kliestikova, J., 2019. The Effectiveness of Marketing Communication and Importance of Its Evaluation in an Online Environment. *Article Sustainability* 1–19.
- Kumparan.com .2021. *Riset UI: Penyaluran BLT Dana Desa Lebih Tepat Sasaran Saat Pandemi*. Available at: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-ui-penyalaran-blt-dana-desa-lebih-tepat-sasaran-saat-pandemi-1v2xHHOwQID/2> (Accessed: 12 October 2021).
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. A. A. E. and Jayanti, L. G. P. S. E. 2020. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis*, 1(1), pp. 15–20.
- Lewis, B. D. 2015. Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other Mistakes', *Public Administration and Development*, 35(5), pp. 347–359. doi: 10.1002/pad.1741.
- Liputan6.com .2020. *Begini Gambaran APBN 2020 di Tengah Wabah Corona*. Available at: <https://id.berita.yahoo.com/bagini-gambaran-apbn-2020-di-090032758.html> (Accessed: 15 February 2022).
- Low, J., Ernst, C. G. and Low, J. 2000. The Value Creation Index, *Journal of Intellectual Capital*, 1(3), pp. 252–262.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mandl, U., Dierx, A. and Ilzkovitz, F. 2008. *The Effectiveness and Efficiency of Public Spending*. doi: 10.2765/22776.
- Maulana, Y. 2016. Review Buku Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), pp. 261–268.
- merdeka.com. 2021. *Riset UI Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Selama Pandemi Lebih Efektif*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/riset-ui-sebut-penyalaran-blt-dana-desa-selama-pandemi-lebih-efektif.html><https://www.merdeka.com/peristiwa/riset-ui-sebut-penyalaran-blt-dana-desa-selama-pandemi-lebih-efektif.html> (Accessed: 12 October 2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. PMK No 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 2021. Indonesia.
- Prasetya, E. 2021. *Korupsi APBDes, Mantan Kades di Sidoarjo Dicidaduk*, *merdeka.com*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-apbdes-mantan-kades-di-sidoarjo-dicidaduk.html> (Accessed: 8 October 2021).
- Ramadhan, A. 2020. *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*, *kompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> (Accessed: 8 October 2021).
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Susanto, A. W., Moh., K. and Badriyah, N. 2021. The Role Of Village Funds in Village Financial Independence (A Case Study in Jombang Regency), *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(1), pp. 32–40.
- Umami, D. R. and Widodo, H. 2021. Accounting Treatment In Increasing Accountability And Transparency Of Budget Management With The Concept Of Value For Money, *Academia Open*, 5, pp. 1–12. doi: 10.21070/acopen.5.2021.2192.
- Watts, J.D., Tacconi, L., Irawan, S., Wijaya, A.H., 2019. Village Transfers for The Environment: Lessons from Community-Based Development Programs and

The Village Fund. *Forest Policy and Economics* 108.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>

- Yunianti, U. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, (2009).
- Yusuf, S., Umanailo, M.C.B., Putri, R.N., Qhuril, D., Ely, M., Darma, D., 2019. Village Institution Relations in the Utilization of Village Funds in Namlea District. *International Journal Of Scientific & Technology Research* 8, 1872–1876.